

ai organisasi Islam terbesar di Indo
ap dalam perkembangannya, baik
titasnya.

ngan ini mengalami proses yang p
lam Indonesia yang tidak dapat d
elanda dan Jepang sehingga men
oleh bangsa Indonesia dengan dia
an menyeluruh.

dengan persoalan tersebut, maka
tang bagaimana perkembangan l
da, penjajahan Jepang, era kem
ah pokok-pokok pikiran yang aka

Perkembangan ini mengalami proses yang panjang dalam sejarah umat Islam Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dengan penjajahan Belanda dan Jepang sehingga mengantarkan perang kemerdekaan oleh bangsa Indonesia dengan diakhiri kemerdekaan secara total dan menyeluruh.

Kaitannya dengan persoalan tersebut, maka pada bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana perkembangan NU pada era penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, era kemerdekaan dan era merdeka. Inilah pokok-pokok pikiran yang akan dibahas secara kronologis.

144 *Journal of Management Inquiry* 16(2)

nya di daerah, ser

berdirinya Komite Khilafat yang disusul oleh berdirinya Komite Hiiiaz.

Dengan demikian peristiwa itu dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa yang mendorong para ulama pesantren untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut :

1. Ingin bekerja sama untuk memelihara dan mengembangkan Agama Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah dan berdasarkan salah satu mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).
2. Ingin bekerja sama untuk mewujudkan keselamatan sebesar-besarnya bagi umat Islam.
3. Mengobarkan semangat cinta tanah air dan memperjuangkan Indonesia.

Karena itu apabila ada tuduhan bahwa NU didirikan atas prakarsa orang-orang Belanda untuk mempertahankan penjajahan, adalah sangat keliru tidak rasional (tidak masuk akal) dan bertentangan dengan kenyataan sejarah.

Setelah resmi berdiri dan memiliki anggaran dasar, maka pengurus NU melakukan gebrakan dan usaha untuk mencapai tujuannya, antara lain :

1. Mengirim delegasi menghadap kepala Raja Hijaz untuk memohon agar kaum muslimin diberi kebebasan mengikuti salah satu mazhab empat di Al-Haramain (Makkah dan Madinah) dan mengizinkan kitab-kitab yang beredar berdasarkan mazhab empat serta mohon agar tetap diramaikannya tempat-tempat bersejarah seperti tempat kelahiran Siti Fatimah dan lain-lain.

Pada tanggal 24 Dzulhijjah 1346 H Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman-Sa'ud menjawab dengan surat yang ditujukan kepada Rois Aam dan Katib PBNU (dalam hal ini KH Hasyim Asy'ari dan KH Alwi bin Abdul Aziz) yang isinya menegaskan bahwa umat Islam bebas melakukan apa saja di Makkah dan

- Tradisi, Sumber Mata Air dan Akhlak Kaum Nahdliyin*

- Meskipun Nahdlatul Ulama (NU) bukan organisasi politik, akan tetapi NU tidak berdiam diri terhadap hal-hal yang menjadi tuntutan bangsa Indonesia terutama umat Islam. Perjuangan dan tuntutan NU terhadap pemerintah penjajahan sebagian dilakukan sendiri dan sebagian dilakukan bersama MIAI. Hal-hal yang diperjuangkan NU pada waktu penjajahan Belanda antara lain :

- Demikian usaha-usaha dan gebrakan Nahdlatul Ulama pada masa penjajahan Belanda, dan sudah barang tentu bahwa semua apa yang telah dihasilkan melalui perjuangan yang cukup panjang

tersebut, tidak hanya dirasakan dan dinikmati oleh warga Nahdliyin saja akan tetapi seluruh umat Islam Indonesia pada waktu itu

B. NU pada Era Penjajahan Jepang

Pemerintah bala tentara Jepang mendekati kalangan Islam dengan membentuk Kantor Urusan Agama (KUA, dulu disebut SHU-MUBU), sehingga memiliki akses langsung kepada kiai pedesaan tanpa melalui pamong praja pribumi dan bahkan pengurus MIAI. Kantor ini menyelenggarakan pendidikan latihan bagi para kiai dengan mengajarkan sejarah kewarganegaraan, senam dan bahasa Jepang, tindakan Jepang ini membawa kiai dalam arus politisi yang berlangsung cepat.

Hubungan Jepang dengan Islam yang secara keseluruhan tampak baik itu sempat memanas, ketika Jepang meminta rakyat Indonesia melakukan "Saikere".

Keikutsertaan sejumlah besar kiai sebagai sukarelawan militer Indonesia dalam Peta (Pembela Tanah Air), yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1943 dan mungkin merupakan cara terbaik Jepang untuk menjamin agar pasukan tersebut benar-benar mengakar di masyarakat, tentulah ikut mengubah posisi dan harapan peran mereka di masa depan.

MIAI masih melakukan kegiatannya ketika Jepang menduduki Indonesia. Namun, September 1943 Jepang memberikan pengakuan resmi kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan secara implisit (batiniyah) tak mengakui organisasi lain, termasuk MIAI.

Bulan Oktober 1943 MIAI membubarkan diri dan digantikan dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia) pada November 1943. Tujuan utama, Masyumi adalah untuk memperkuat persekutuan semua organisasi umat Islam dan membentuk Dai Nippon demi kepentingan Asia Timur Raya. Keanggotaan dalam Masyumi terbuka bagi individu dan juga organisasi yang berstatus badan hukum (praktis hanya NU dan Muhammadiyah) KH Hasyim Asy'ari men-

jabat sebagai Presiden Masyumi, KH A. Wahid Hasyim dan KH Mas Manshur (Muhammadiyah) menjabat wakil-wakil presiden yang menangani urusan harian di Jakarta, sedangkan KH Abdul Wahab Hasbullah (NU) dan Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah) menjadi penasehat. Belakangan, PUII dan PUI di Jawa Barat juga resmi diakui dan bergabung ke dalam Masyumi. Seorang ulama dapat menjadi anggota Masyumi dengan syarat sudah mendapat persetujuan Shumubu (Kantor Urusan Agama).

Bulan Agustus 1944, Shumubu di tata ulang KH Hasyim Asy'ari sebagai ketua, KH A. Wahid Hasyim dan KH Kahar Muzakkir menempati kedudukan puncak di dalamnya. Melalui tokoh-tokohnya, praktis Masyumi telah menjadi bagian dari pemerintah untuk menangani urusan-urusan umat Islam. Tampaknya kedekatan dengan pemerintah Jepang ini tak menyebabkan para pemimpin NU dan Muhammadiyah berada dalam dilema yang lebih besar dibandingkan dengan peranan NU dalam menerapkan Nasakom pada masa Demokrasi terpimpinnya Sukarno. Melalui pernyataan PM Kuniaki Kaiso di depan Parlemen, beberapa minggu kemudian, Jepang menjanjikan Kemerdekaan Indonesia. Barisan tentara sukarela yang merekrut kalangan Muslim bernama "Hizbullah" (Tentara Allah) lalu dibentuk, para anggotanya, yang dilatih oleh para perwira Peta, telah menyatakan kesetiaan mereka kepada Masyumi, KH. Wahid Hasyim, sebagai wakil presiden Masyumi secara resmi memberikan latihan barisan-barisan Hizbullah yang pertama.

Dalam sidang mempersiapkan Indonesia merdeka (BPUPKI dan PPKI), tokoh-tokoh NU lalu terlibat intensif dalam perdebatan tentang dasar negara dan konstitusi Indonesia merdeka. Di antara tokoh-tokoh NU adalah KH Masykur dan KH A. Wahid Hasyim.

C. NU pada Era Perang Kemerdekaan

Masa antara permusuhan dasar dan konstitusi negara hingga Pemilu 1955, banyak hal terjadi pada NU, keikutsertaan wakil-wakil NU dalam pembentukan Negara, penegasan sikap NU, atas

negara yang terancam untuk diduduki kembali oleh kekuatan Barat, afiliasi politik dalam partai Masyumi dan berakhir dengan keputusan NU untuk menjadi partai politik mandiri.

Pengalaman di bawah pendudukan Jepang telah melibatkan NU dan umat Islam Indonesia dalam kegiatan politik lebih intensif, dan mempersiapkan mereka untuk melakukan perjuangan bersenjata. NU dan para pendukungnya memainkan peranan aktif dan radikal pada masa revolusi. Banyak di antara mereka yang bergabung dalam barisan Hizbullah ternyata mempunyai latar belakang NU. Komandan tertinggi Hizbullah adalah seorang pemimpin NU asal Sumatera Utara (Mandailing), Zainul Arifin. Namun, ketika perjuangan dimulai, pasukan-pasukan gerilya muslim non-regular, yang bernama Sabilillah, juga muncul. Pasukan-pasukan ini hampir semua terdiri dari para kiai desa bersama para pengikutnya, komandan tertinggi mereka juga pemimpin NU, Kiai Masykur dari Malang (kelak menjadi politisi NU terkenal dan pernah menjabat sebagai menteri).

NU juga mengambil bagian menentukan dalam perjuangan di Jawa Timur dan mengukuhkan sikapnya atas negara Indonesia, tanggal 21- 22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang (konsul) NU di seluruh Jawa-Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai Jihad (perang suci). Pernyataan yang kemudian terkenal sebagai "Revolusi Jihad" ini, dikeluarkan di tengah Indonesia muda berada dalam situasi kritis. Tentara Inggris pertama (atas nama "Netherlands Indies Civil Administration, NICA) menduduki ibukota RI Jakarta akhir September 1945, pertengahan Oktober, pasukan Jepang merebut kembali beberapa Kota Jawa yang telah jatuh ke tangan Republik yang masih muda dan menyerahkannya kepada Inggris. Masih dalam bulan Oktober, Bandung dan Semarang jatuh ke tangan Inggris.

Sementara masyarakat Jawa Timur "menunggu" kedatangan pasukan Sekutu di Surabaya (akhir Oktober), pemerintah Indonesia masih menahan diri dari melakukan perlawanan. Peme-

rintah mengharapkan adanya penyelesaian secara diplomatik dan tampaknya menerima saja ketika bendera Belanda dikibarkan lagi di Jakarta. Sebaliknya, “Revolusi Jihad” meminta pemerintah Republik untuk menyatakan perang suci. Tak pelak lagi, “Revolusi Jihad” telah membakar semangat perlawanan Jawa Timur (arek-arek Surabaya). Pada tanggal 10 Nopember 1945, perlawanan massa kepada Sekutu pecah, di mana banyak pengikut NU yang terlibat aktif. Pasukan-pasukan non-regular yang bernama “sabilillah”, yang rupanya dibentuk sebagai respon langsung terhadap revolusi NU, mengambil bagian aktif. Banyak pula pejuang muda yang mengenakan jimat yang diberikan kiai desa kepada mereka. Bung Tomo, yang membakar massa ke dalam perjuangan melalui pidato radionya, diketahui meminta nasehat (“restu”) kepada Kiai Hasyim Asy’ari.

“Revolusi Jihad” menunjukkan, pertama, NU dapat tampil sebagai kekuatan, radikal yang tak terduga; kedua merupakan legitimasi (pengesahan) bagi Negara dan sekaligus kritik tak langsung terhadap sikap pasif pemerintah.

Ketika Masyumi menjadi sebuah partai politik, November 1945, mengikuti ajakan pemerintah Republik untuk membangun demokrasi multi-partai (Makloemat iks, 16 Oktober 1945 dari Wapres Hatta), NU menggabungkan diri. Keanggotaan partai Masyumi terdiri atas anggota kolektif adalah NU, Muhammadiyah dan dua organisasi regional kecil PUII dan PUI dari Jawa Barat. Kemudian organisasi-organisasi Islam lainnya bergabung.

NU benar-benar tak terwakili dalam kepemimpinan Masyumi. Hal ini mencerminkan langkanya anggota NU yang mempunyai tingkat pendidikan umum modern yang memadai, sehingga berakibat pada diskriminasi terhadapnya. Tak satupun jabatan eksekutif Masyumi jatuh ke NU, namun Kiai Hasyim dijadikan sebagai Presiden Badan Musyawarah (Majelis Syura) partai KH Wahid Hasyim menjadi salah satu dari tiga wakil penghubung presiden dan KH Wahab Hasbullah sebagai anggota (penasehat eksekutif). Majelis Syura tak banyak menentukan langkah Masyumi dan sta-

tusnya diturunkan menjadi hanya penaset belaka (1949). Dari 14 anggota pengurus eksekutif, hanya dua orang yang mewakili NU.

Proses cukup panjang dan menarik berlangsung antara NU di satu pihak dengan non-NU dalam Masyumi, NU kemudian keluar dari Masyumi (1952) dan menjadi kontestan Pemilu 1955. Secara mengejutkan NU mengantongi 18,4 % dari seluruh suara yang sah dan menduduki tempat ketiga di bawah PNI (22,3 % suara) dan Masyumi (20,9%). Wakil NU di parlemen meningkat dari 8 dalam Masyumi menjadi 45 kursi (PNI 57, Masyumi 57 dan PKI 39). Selama demokrasi parlementer NU gagal memberikan dampak yang sepadan dengan besar jumlah pendukungnya. Ketika demokrasi dipimpin (1959-1965), NU menjadi penyangga rejim otoriter populis ini yang menyebabkan sejumlah perselisihan internal.

Selama transisi (1965-1966) NU harus mendefinisikan ulang peranannya dalam Orde Baru (1967-sekarang), setelah tampil sebagai kekuatan oposisi kalangan "tradisionalisme-radikal, NU menyelam dalam arus depolitisasi Islam yang massif.

D. NU pada Era Merdeka

1. NU pada Masa Orde Lama (Orla)

Pada waktu itu presiden membentuk kabinet baru dan dirinya sendiri menjadi formatur menunjuk langsung menteri-menteri yang diangkatnya tanpa konsultasi dengan parlemen atau pun partainya.

Maka disinilah NU menghadapi "dhororain" (dua bahaya); ikut masuk ke dalam kabinet berarti tidak menghormati konstitusi dan melumpuhkan parlemen akan tetapi kalau tidak masuk berarti menjadi partai oposisi. Maka dalam menghadapi keadaan darurat ini NU membenarkan anggota-anggotanya masuk dalam kabinet baru yang sebut Kabinet Karya dengan memilih madharat yang lebih ringan, yaitu :

1. Tempat NU tidak diduduki golongan yang membahayakan kehidupan negara dan bangsa.

diperlukan tidak tercapai.

Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama sendiri segera mengadakan Sidang Dewan Partai (hadir 59 anggota) pada tanggal 26-28 Maret 1958 dengan mengambil keputusan, bahwa Nahdlatul Ulama dapat menerima UUD 1945 sebagai UUD RI dengan pengertian:

1. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD tersebut pada keseluruhannya dan merupakan sumber hukum.
2. Islam tetap menjadi perjuangan partai NU.
3. Hasil Konstituante (pleno) tetap berlaku.

Maka pada tanggal 5 Juli 1959 keluarlah Dekrit Presiden yang intinya:

1. Membubarkan Majelis Konstituante.
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi dan UUDS 1950 tidak berlaku.
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan-golongan.
4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Dalam Dekrit Presiden tersebut juga dinyatakan, “Bahwa kami berkeyakinan bahwasanya Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”.

Dengan Dekrit ini kekuasaan Presiden semakin besar. Sebenarnya dengan kembali ke UUD 1945 pemerintahan bisa menjadi lebih tertib, akan tetapi oleh karena semuanya serba sementara, seperti MPR sementara, DPA sementara, DPR sementara yang disebut DPR Gotong Royong”, maka boleh dikata semuanya apa kataku, apa kata Presiden. Misalnya, hampir setiap pidato Presiden dijadikan landasan politik dan ekonomi Indonesia. Pidato kenegaraan 17 Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” oleh DPAS ditetapkan sebagai “GBHN” yang disebut

Nasakom adalah tidak benar.

Dengan semangat anti komunis dan bertujuan untuk menggagalkan niat jahat PKI, maka NU ikut bekerja sama dengan partai-partai yang lain seperti halnya Muhammadiyah ikut serta dalam kerangka tindakan politik presiden Sukarno. Dalam kabinet yang dibentuk sesudah kembali ke UUD 1945 yang diberi nama Kabinet Kerja NU juga ikut duduk di dalamnya. Antara lain KH A. Wahib Wahab, sebagai Menteri Agama yang berhasil mendirikan PTAIN yang kemudian menjadi IAIN (sampai sekarang).

Dalam pada itu konsolidasi organisasi diperhebat dengan mendirikan berbagai badan otonom yang dapat mengimbangi gerakan langkah PKI, antara lain :

1. SARBUMUSI di kalangan buruh, PKI punya SOBSI.
2. SERNEMI di kalangan nelayan.
3. LESBUMI di kalangan seniman, budayawan, PKI punya LERKA.
4. PERGUNU di kalangan guru, PKI punya PGRI non-vak sentral.
5. PERTANU yang sudah lama berdiri ditingkatkan kemampuan dan kegiatannya menghadapi BTI.
6. Dalam barisan Anshor dibentuk Barisan Serba Guna (BANSER).

Anggota NU menjadi menggelembung, karena dapat menjadi payung berkumpulnya umat Islam yang anti komunis, termasuk tidak sedikit bekas anggota Masyumi dan GPI masuk ke dalam NU dan GP Ansor.

Konfrontasi antara NU dan PKI secara sembunyi-sembunyi atau terang-terang –baik dalam rapat-rapat ataupun– clash pisik secara terbuka dalam menghadapi aksi sepihak PKI/BTI sering terjadi.

Begitulah PKI dengan intensif dan sistematis berusaha merebut pengaruh di segala sektor sampai mampu melakukan infiltrasi ke dalam lingkungan angkatan bersenjata, akhirnya setelah merasa kuat dibarengi kekhawatiran meninggalnya presiden yang men-

Kegagalan Kudeta PKI dan kemunculan Suharto merupakan babak baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejak 1965 mulailah kurun waktu yang dikenal sebagai Orde Baru, – sebelumnya disebut Orde Lama– yaitu suatu pengertian politis sebagai upaya meluruskan kembali sejarah perjalanan bangsa berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen karena Orde Lama dinilai telah menyimpang dari landasan UUD 1945 dan Pancasila.

Bagaimana sikap NU menghadapi pembaharuan politik yang dilancarkan oleh Orde Baru? Partai-partai politik khususnya NU memandang bahwa dengan jatuhnya Orde Lama adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan politik dengan cara mendesak pemerintah segera mengadakan pemilihan umum. Pemilu yang direncanakan tahun 1968 kemudian tertunda karena UU Pemilihan Umum tersebut, pemerintah ingin menunda sampai tahun 1973, akhirnya diputuskan untuk dilangsungkan tahun

1971 atas desakan NU. Dalam UU Pemilihan Umum yang disahkan pada tahun 1969—kedudukan ABRI dijamin melalui pengangkatan. Secara tidak langsung ABRI berhasil mengukuhkan kehadirannya, akan tetapi bagi partai berarti “merosotnya peranan partai terutama NU”.

H. Subhan ZE, seorang tokoh NU memberi komentar yang bernada pasrah:

“Secara umum dikatakan, bahwa UU Pemilihan Umum tidak relevan dan tidak “Demokratis” secara sempurna. Namun, demikian masih lebih baik daripada tidak ada undang-undang pemilihan umum itu. Ini merupakan permulaan yang baik dari kehidupan demokrasi, setelah ditinggalkan oleh rezim Sukarno”.

Subhan ZE, adalah seorang tokoh NU yang cukup berbobot. Ia terpilih menjadi Ketua I (semula Ketua IV) dalam Mukhtar NU ke-24 di Bandung tahun 1968. Dia juga menjabat Wakil Ketua MPR Sementara. Kalangan NU menilai ia seorang tokoh yang keras sikapnya, dan ia sendiri sering menilai sikap NU selama ini (di zaman Orde Lama) terlalu lunak.

Subhan memang sangat ambisi untuk membawa NU sebagai kekuatan sosial politik yang disegani. Di saat posisi NU sedang terjepit, khususnya di lembaga konstitusi, Subhan justru mengemukakan resep untuk mengangkat derajat NU di medan politik, Oportunisme hanya membuat NU akhirnya disenangi dan dipergunakan, tetapi tidak dihormati dan didengar samasekali.

Sikap Subhan tersebut akhirnya menimbulkan pertentangan di dalam tubuh NU. Secara terang-terangan Idham Khalid mengkritik sikap Subhan. Namun dia tampaknya mempunyai banyak pendukung. Mukhtar ke-25 di Surabaya hampir saja memilih dia sebagai Ketua Umum, akan tetapi atas tekanan KH Bisri Syamsuri seorang ulama senior yang kemudian menjadi Rais Aam menggantikan KH Wahab Hasbullah, Subhan mengundurkan diri dari pencalonan. Akhirnya ambisi Subhan kandas dengan keluarnya

Pembangunan yang digalakkan oleh Orde Baru telah mulai terasa dampaknya pada NU. Di saat NU berusaha memperkuat pengaruh politiknya, secara organisasi keagamaan ia makin mundur, dan kemunduran ini secara realistis disebabkan lima hal penyebabnya (sejak 1961), yaitu :

Sejak NU menjadi partai politik, apa yang diutamakan hanyalah angka pengikut dan kursi. Ia mengabaikan pengembangan ajaran agama.

Karena kurangnya tenaga teknokrat muncullah tokoh-tokoh baru menduduki posisi kepengurusan walaupun integritas kea-

Tradisi, Sumber Mata Air dan Akhlak Kaum Nahdliyin

